

Atasi Polusi Plastik dari Aksi Nasional ke Aliansi Global

Rizal Malik
CEO WWF-Indonesia

MENJELANG ketika sedang berlangsung, dan pascadebat calon presiden putaran kedua pada Minggu malam (17/2), banyak pihak telah mengulas komitmen lingkungan keduanya kandidat dengan meneliti pernyataan kebijakan yang diterbitkan tiap-tiap tim sukses. Dari 260 pernyataan kebijakan yang diuraikan calon nomor urut satu, 20% tergolong isu-isu lingkungan. Pihak Jokowi memusatukkan poin pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan, keadilan dalam kepemilikan tanah, penegakan hukum untuk kejadian lingkungan, sektor energi dan pangan, serta pengakuan atas hak masyarakat adat.

Proporsi yang kurang lebih sama, 18% disampaikan calon nomor urut dua. Pihak Prabowo Subianto menyatakan komitmen untuk isu lingkungan dalam pernyataan kebijakannya. Namun, jauh lebih pendek, hanya 148 poin. Mereka menyentuh poin pengelolaan hutan berkelanjutan, kesetaraan dalam kepemilikan tanah, penegakan hukum lingkungan, dan energi terbarukan.

Satu yang pasti, tidak ada elaborasi lebih rinci dari kedua kandidat terkait polusi plastik di darat dan di laut, padahal isu ini telah mencapai tingkat krisis. Sebanyak 8 juta ton plastik dari daratan masuk ke perairan dan bermuara ke lautan setiap tahun.

Angka ini diproyeksikan meningkat empat kali lipat pada 2050. Limbah plastik di laut berubah menjadi polutan dan plastik mikro berbahaya bagi keseimbangan alam, industri, mata pencarian, dan kesehatan manusia yang dampaknya baru kita pahami secara lebih baik sekarang.

Parapeneliti mengatakan, bahkan mungkin angka sampah plastik yang sebenarnya lebih dari 8 juta ton karena diperkirakan jumlah ini hanya data sampah plastik yang berasal dari penduduk pesisir di 192 negara. Mengingat jumlah yang fantastis ini, kita layak menyebut limbah sampah plastik ini sebagai polusi.

Pemerintah berkesempatan memanfaatkan momentum penting tahun ini. Keputusan politik untuk berperan nyata dalam perang global melawan polusi plastik perlu dicapai karena menyangkut keselamatan dan kesehatan warga Indonesia

dan dunia.

Indonesia termasuk negara poluter penghasil 3,2 juta ton sampah plastik pada 2010, yang sekitar 1,29 juta ton darinya bermuara di samudra, menurut penelitian yang diterbitkan jurnal *Science* 2015.

Bank Dunia memperkirakan, setiap 250 juta penduduk Indonesia bertanggung jawab antara 0,8 kg sampai 1 kg sampah plastik per tahun. Angka itu menempatkan Indonesia kedua setelah Tiongkok dengan 8,8 juta ton sampah, atau 27% dari limbah plastik global.

Studi yang dipimpin ilmuwan Jenna Jambeck dari University of Georgia ini menemukan, sekitar 8 juta ton limbah plastik berakhir di lautan setiap tahun. Jambeck et al menggabungkan data yang tersedia pada limbah padat dengan model yang menggunakan kepadatan penduduk dan status ekonomi untuk memperkirakan jumlah limbah plastik berbasis tanah yang masuk laut.

Parapeneliti mengatakan, bahkan mungkin angka sampah plastik yang sebenarnya lebih dari 8 juta ton karena diperkirakan jumlah ini hanya data sampah plastik yang berasal dari penduduk pesisir di 192 negara. Mengingat jumlah yang fantastis ini, kita layak menyebut limbah sampah plastik ini sebagai polusi.

Pemerintah berkesempatan memanfaatkan momentum penting tahun ini. Keputusan politik untuk berperan nyata dalam perang global melawan polusi plastik perlu dicapai karena menyangkut keselamatan dan kesehatan warga Indonesia

Padahal, tak dapat dimungkiri, laut menghubungkan kita semua.

Indonesia jelas tidak akan mampu sendiri memecahkan masalah polusi plastik di laut karena ini ialah masalah global dan lintas batas. Bahkan, kebijakan terbaik tingkat lokal atau regional pun bisa saja terfragmentasi, tidak menyentuh esensi, atau gagal dalam tahap implementasi. Dengan kehidupan manusia dan alam yang menjadi pertaruhan, kelompok lingkungan terpangil untuk mendorong negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, supaya merespons tantangan global ini secara efektif. Kesepakatan internasional yang baru dan mengikat secara hukum sebagai respons global yang terkoordinasi dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi problem polusi plastik laut.

Perjanjian itu harus mencakup: sasaran global yang di definisikan jelas, pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencegah, serta mengendalikan dan menghilangkan polusi plastik laut di setiap negara. Termasuk, langkah-langkah penghitungan siklus hidup plastik global. sebuah resolusi diharapkan dicapai untuk pengelat tata kelola polusi plastik di laut secara global. Pemerintah negara-negara di dunia akan memiliki kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

meliputi keuangan, teknologi, serta pengembangan kapasitas.

Beberapa konvensi internasional yang ada telah mengatur hal ihwal polusi plastik. Namun, UN Environment Assessment 2017 mengidentifikasi kesenjangan hukum dan kurangnya kerangka global yang menargetkan polusi plastik di laut secara khusus. Kelompok ahli dibentuk United Nations Environment Assembly (UNEA) mencatat, "respon yang efektif memerlukan kesepakatan baru yang mengikat secara hukum."

Saat ini ada gelombang kuat dukungan internasional bagi kesepakatan baru untuk mengatasi polusi plastik di laut. Tahun lalu saja, pemerintah, masyarakat sipil dan jutaan orang di seluruh dunia telah bersuara menuntut tindakan legislatif yang lebih pasti untuk mengatasi polusi plastik di laut. Sampai saat ini, ada 30 pemerintahan menyatakan dukungan terhadap aksi nyata dunia yang lebih terkoordinasi.

Pertemuan Tingkat Tinggi Lingkungan PBB yang keempat (UNEA4) di Nairobi, Kenya, 11-15 Maret 2019 akan fokus pada upaya perubahan yang memungkinkan bagi sistem global yang lebih berkelanjutan. Upaya ini termasuk penanganan konsumsi, produksi, pembuangan dan daur ulang/pemulihran plastik secara global. sebuah resolusi diharapkan dicapai untuk pengelat tata kelola polusi plastik di laut secara global. Pemerintah negara-negara di dunia akan memiliki kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

untuk meletakkan dasar bagi solusi global guna mengatasi masalah polusi plastik di laut. Namun demikian, kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum ini tidak dapat direalisasikan tanpa kepemimpinan yang kuat dari Indonesia.

RI sebenarnya sudah menyatakan komitmen tujuan pengurangan sampah plastik hingga 70% pada 2025 dan dukungan pendanaan se nilai US\$ 1 triliun per tahun untuk mengurangi jumlah produk plastik dan bentuk sampah lain yang mencemari perairan RI.

Pernyataan ini diumumkan Menko Bidang Kemanitiman RI Luhut Binsar Panjaitan yang juga mengusulkan penganti plastik yang non-biodegradable dengan bahan yang biodegradable, seperti singkong dan rumput laut. Kebijakan lain, penerapan pajak atas kantung plastik setali pakai, juga kampanye publik yang konsisten guna mengedukasi perubahan perilaku.

Komitmen RI ini layak dipuji. Indonesia perlu terus menjaga momentum dengan secara terbuka menyatakan komitmen untuk mendorong kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum, guna mengatasi polusi plastik laut sebagai masalah global dan lintas batas di sesi ke empat UNEA di Nairobi, Kenya, Maret 2019.

Krisis plastik ialah masalah bersama, dan hanya upaya global terpadu dan ambisius yang dapat mengatasinya. Kita harapkan Indonesia konsisten mendukung upaya untuk merealisasikan samudra luas yang bebas dari polusi plastik.